



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MAJALAH WARTA PEMERIKSA
APRIL 2024

wfp



MANFAATKAN *BIG DATA*, BPK LAKSANAKAN PEMERIKSAAN LKPP 2023

Peningkatan kualitas pelaksanaan APBN
agar pencapaian pembangunan dirasakan oleh masyarakat.

Warta *Pemeriksa* edisi April 2024 antara lain mengangkat tema utama tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Seperti dilaporkan dalam rubrik Sorotan, belum lama ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 (*unaudited*) di kantor pusat BPK.

Pada kesempatan itu, BPK meminta pemerintah terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengalokasian dan pelaksanaan APBN. Dengan begitu, kualitas LKPP, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dapat diikuti dengan kualitas pencapaian hasil-hasil pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua BPK Isma Yatun menjelaskan, untuk memberikan keyakinan memadai, BPK akan melaksanakan serangkaian prosedur pemeriksaan. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian risiko yang didukung dengan pemanfaatan *big data analytic*.

"Hasil pemeriksaan LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai, sejauh mana APBN digunakan untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan dan tujuan bernegara," kata dia.

Informasi lainnya, BPK juga telah melakukan pemeriksaan kinerja PT Sang Hyang Seri (SHS) atas upaya meningkatkan omzet penjualan benih dan beras. Kemudian upaya menekan harga pokok produksi beras dan mengoptimalkan aset tanah dan bangunan perusahaan.

Dari pemeriksaan, BPK mencatat sejumlah upaya yang dilakukan manajemen PT SHS. Namun, ditemukan masih terdapat beberapa permasalahan. Misalnya saja kinerja keuangan PT SHS yang tidak memadai dan berdampak pada kepastian keberlangsungan usaha.

Simak juga ulasan redaksi dalam rubrik *Sharing Knowledge* yang membahas mengenai upaya meningkatkan mutu audit dengan *peer review*. Hal ini sebagai bentuk jaminan atas mutu pemeriksaan yang dilakukan BPK.

Jangan lewatkan informasi dalam rubrik *Kesehatan* yang membahas mengenai kebahagiaan dan memaafkan. Dijelaskan bahwa kebahagiaan adalah kondisi psikologis positif yang ditandai dengan kepuasan terhadap masa lalu, emosi positif yang tinggi pada masa kini, dan rendahnya emosi negatif.

Hal ini pun erat kaitannya dengan memaafkan. Berdasarkan penelitian, memaafkan dapat membuat kita lebih tenang, lebih bahagia, dan dapat mengurangi kecemasan.

Masih banyak informasi lain yang telah redaksi siapkan untuk pembaca setia *Warta Pemeriksa* dalam edisi April 2024 ini. Selamat menikmati.

SOROTAN	4	Manfaatkan <i>Big Data</i> , BPK Laksanakan Pemeriksaan LKPP 2023
	6	Kepak Sayap BPK Menembus Level Global
BPK BEKERJA	14	Menjaga Langkah Penyehatan Sang Hyang Seri
SHARING KNOWLEDGE	19	Meningkatkan Mutu Audit dengan <i>Peer Review</i>
INTERNASIONAL	23	SAI20 Sepakat Kawal Krisis Iklim, Kelaparan, dan Kemiskinan
	26	BPK Soroti Peran Sentral SAI dalam Hadapi Perubahan Iklim di Wina
BPK PERWAKILAN	28	Perkuat Spiritual Pegawai, BPK Resmikan Mushola Baitul Hasib di Perwakilan Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat
SUDUT PANDANG	32	Sri Mulyani: APBN Berhasil Melalui Gelombang Dinamika Global
BEDAH BUKU	36	Memahami Stoisisme dan Kebahagiaan Lewat Buku Filosofi Teras
KESEHATAN	39	Bahagia dengan Memaafkan
TEKNOLOGI	42	Hadiri Forum MIKTA SAIs, BPK Tekankan Pentingnya Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab
KILAS	44	Polri Diminta Buat Perencanaan Anggaran yang Baik
	46	Anggota V BPK: Setiap Rupiah APBN/APBD Bukan Sekadar Angka dalam Laporan
KOLOM	48	Penerapan Audit Adaptif dengan Kecerdasan Buatan: Solusi Memenuhi Ekspektasi dan Harapan Masyarakat

Pengarah Isma Yatun, Hendra Susanto, Nyoman Adhi Suryadnyana, Daniel Lumban Tobing, Haerul Saleh, Ahmadi Noor Supit, Pius Lustrilanang, Slamet Edy Purnomo, **Penanggung Jawab** Bahtiar Arif, **Wakil Penanggung Jawab** R. Yudi Ramdan Budiman, **Ketua Tim Redaksi** Sri Haryati, **Kepala Sekretariat** Bestantia Indraswati, **Sekretariat** Fitri Yuliantri Permana, Klara Ransingin, Ridha Sukma, Ratna Tri Darmayanti, Apriyana, Sudarman, **Alamat Sekretariat** Gedung BPK RI Jalan Gatot Subroto no 31, Jakarta, **Telepon** 021-25549000 Pesawat 1188/1187, **Email** wartapemeriksa@bpk.go.id
Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

bpk.go.id



Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.
(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

Manfaatkan *Big Data*, BPK Laksanakan Pemeriksaan LKPP 2023



▲ Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan LKPP (*unaudited*) Tahun 2023 kepada Ketua BPK Isma Yatun dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 di BPK, Kamis (28/3/2024).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 (*unaudited*). LKPP Tahun 2023 diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Ketua BPK Isma Yatun dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2023 di BPK pada Kamis (28/3/2024).

Dalam sambutannya, Ketua BPK Isma Yatun mendorong adanya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN. Hal itu agar pencapaian pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat.

"Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan kecukupan pengungkapan," ujar Isma.

Untuk melaksanakan pemeriksaan kali ini, BPK akan menjalankan serangkaian prosedur pemeriksaan. Salah satunya, penilaian risiko akan didukung dengan pemanfaatan *big data analytic*.



Isma juga menegaskan, BPK akan mempertimbangkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya terkait dengan permasalahan yang berdampak dan mempengaruhi opini LKPP dan LKKL Tahun 2022. Selain itu, BPK juga akan mencermati hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terkait dengan pelaksanaan anggaran pada 2023.

Kemudian, BPK juga menyoroti adanya berbagai kebijakan yang diterapkan pada 2023 salah satunya pembentukan Badan Pangan Nasional dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sementara itu, Anggota II BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing mengapresiasi pemerintah karena telah berhasil melalui masa pandemi Covid-19

dan melaksanakan APBN 2023. Daniel menyampaikan, BPK akan berupaya merampungkan pemeriksaan secara tepat waktu. Seperti diketahui, BPK memiliki kewajiban untuk menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP dan menyampaikannya kepada DPR dan Presiden paling lambat dua bulan sejak LKPP diserahkan kepada BPK.

Daniel mengatakan, saat ini BPK mendorong adanya pengukuran capaian kinerja pemerintah sehingga dapat menggambarkan kontribusi APBN dalam mencapai sasaran pembangunan. "Untuk itu, pemerintah diharapkan segera mendesain infrastruktur atau *support system* yang memadai untuk mengintegrasikan pelaporan informasi keuangan atau *financial reporting* dengan pelaporan informasi kinerja pemerintah atau *performance reporting*," ungkap Daniel.



Kepak Sayap BPK Menembus Level Global

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus mengembangkan sayapnya di kancah internasional. Pada tahun ini, BPK kembali dipercaya menjadi pemeriksa eksternal pada beberapa lembaga internasional.

Organisasi internasional yang akan diperiksa oleh BPK yakni International Maritime Organization (IMO) untuk Periode 2020-2023. Tahun ini adalah pemeriksaan terakhir untuk periode 2020-2023. Akan tetapi, BPK juga telah ditunjuk untuk melanjutkan mandatnya sebagai pemeriksa eksternal IMO serta entitas di bawah kendalinya, yaitu World Maritime University (WMU) yang berlokasi di Malmö, Swedia dan International Maritime Law Institute (IMLI) yang berlokasi di Msida, Malta untuk periode kedua 2024-2027. IMO merupakan *specialized agency* dari PBB yang mempromosikan kerja sama antarpemerintah dan antarindustri pelayaran untuk meningkatkan keselamatan maritim dan untuk mencegah polusi air laut.

Kemudian, BPK juga melakukan pemeriksaan pada Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk periode tahun 2023-2026. IPU adalah organisasi internasional untuk parlemen dunia. IPU memfasilitasi diplomasi parlemen dan memberdayakan parlemen serta anggota parlemen dalam mempromosikan perdamaian, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.



Selain itu, BPK juga memeriksa World Intellectual Property Organization (WIPO) untuk periode tahun 2024-2029. WIPO adalah *specialized agency* dari PBB yang memiliki misi memimpin pengembangan sistem Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) internasional yang seimbang dan efektif, yang memungkinkan inovasi dan kreativitas untuk keuntungan semua orang.

Ke depannya BPK juga akan berupaya menjalin kemitraan dengan organisasi internasional lainnya sebagai auditor eksternal. BPK kini tengah menunggu persetujuan terkait penunjukan BPK menjadi pemeriksa eksternal pada Organisasi Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Securities (CTI-CFF) yang pusatnya ada di Manado, Sulawesi Utara.

Pemeriksaan pada IMO dan WIPO meliputi pemeriksaan laporan keuangan dan pemeriksaan kinerja, sedangkan pada IPU, WMU, dan IMLI adalah pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan berkaitan dengan akuntabilitas organisasi, sedangkan pemeriksaan kinerja berkaitan dengan peningkatan kemampuan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi.

Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, BPK berharap dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja organisasi internasional yang pada akhirnya akan ikut membantu terciptanya perdamaian dunia. Hasil pemeriksaan BPK pada organisasi internasional diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan nilai tambah untuk organisasi yang diperiksa baik dari sisi akuntabilitas maupun dari pengelolaan proses bisnis organisasi tersebut.



▲ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat menghadiri penunjukan BPK RI sebagai pemeriksa eksternal IMO dalam sidang Majelis IMO ke-33 yang digelar di kantor pusat IMO, London, Inggris pada Jumat (1/12/2023).

Selain itu, pemeriksaan organisasi internasional secara timbal balik juga memberikan kesempatan BPK untuk belajar dari *best practices* yang diterapkan organisasi internasional dalam menjalankan organisasinya. Hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan kompetensi serta kinerja BPK di bidang pemeriksaan dari pengetahuan yang diperoleh melalui pemeriksaan organisasi internasional.

BPK juga bukan hanya satu-satunya pemeriksa yang dapat memberikan jasa pemeriksaan atas organisasi internasional. Sehingga, BPK dituntut untuk terus menerus meningkatkan mutu pemeriksaannya melalui penerapan standar pemeriksaan internasional. Banyaknya SAI yang menawarkan jasa sebagai pemeriksa eksternal ke organisasi internasional menuntut pemeriksa eksternal BPK untuk memiliki nilai lebih dibandingkan dengan SAI-SAI lain.





"Banyaknya SAI yang menawarkan jasa sebagai pemeriksa eksternal ke organisasi internasional menuntut pemeriksa eksternal BPK untuk memiliki nilai lebih dibandingkan dengan SAI-SAI lain."

Di samping itu, adanya kemitraan BPK dengan berbagai lembaga internasional tersebut akan membuka banyak peluang kemitraan bagi BPK dengan berbagai negara yang tentunya semakin menunjukkan peran dan kontribusi Indonesia dan khususnya BPK di dunia internasional.

Persiapan pemeriksaan

Dalam melaksanakan kiprah internasional tersebut, BPK melakukan sejumlah persiapan pemeriksaan. Persiapan secara makro dilakukan antara lain melalui persiapan kapasitas pemeriksa BPK seperti melalui pembentukan Kelompok Keahlian Auditor Eksternal, pembentukan Kelompok Keahlian Alih Bahasa, dan pemberian diklat dan sertifikasi profesi yang diakui internasional kepada para pemeriksa eksternal BPK, serta *sharing knowledge* dari pemeriksa yang lebih berpengalaman.

Selain itu, *focus group discussion* (FGD) juga diadakan bersama kementerian penjurur untuk memperoleh informasi terkait organisasi internasional yang akan diperiksa, diskusi dengan auditor eksternal sebelumnya pada organisasi terkait untuk mendapatkan pemahaman awal, dan melakukan diskusi dengan tim pemeriksa organisasi internasional yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam pengelolaan keuangan misalnya pada standar penyajian laporan keuangan, dan penggunaan aplikasi keuangan yang sama.



▲
Ketua BPK Isma Yatun (tengah) saat memimpin Panel Eksternal Auditor PBB.

Secara mikro, setiap tim pemeriksaan melakukan perencanaan pemeriksaan secara matang. Untuk pemeriksaan tahun pertama atau *initial audit*, BPK akan melakukan serah terima pemeriksaan dari auditor sebelumnya. Dalam kegiatan *handover*, BPK mencari informasi proses bisnis dan area-area mana saja yang dinilai signifikan atau berisiko untuk diperiksa.

Dalam perencanaan pemeriksaan, manajemen dibantu tim pemeriksa juga menyiapkan administrasi pemeriksaan seperti *Engagement Letter* yang di dalamnya berisi pengaturan jalannya pemeriksaan seperti standar pemeriksaan yang diterapkan dan jadwal-jadwal yang akan dipenuhi BPK serta entitas. Selain itu, *Engagement Letter* juga memuat hak dan kewajiban BPK serta entitas dalam pemeriksaan tersebut. Praktik ini tidak ditemui ketika memeriksa entitas nasional.

Selanjutnya, persiapan teknis pemeriksaan yaitu antara lain menyiapkan strategi pemeriksaan yang terus disempurnakan berdasarkan pengalaman pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.

Tugas pemeriksaan atas organisasi internasional pada prinsipnya sama dengan tugas pemeriksaan atas organisasi nasional yaitu untuk pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksa akan menguji asersi-asersi yang telah ditetapkan manajemen organisasi pada laporan keuangan yang diterbitkan. Dalam pemeriksaan kinerja, tim pemeriksa akan melakukan serangkaian prosedur audit untuk menjawab pertanyaan dan tujuan pemeriksaan, misalnya dalam menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan/atau efektivitas program/kegiatan.

Pemeriksaan kemudian akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan bentuk panjang (*Long-Form Audit Report*)

yang tidak hanya berisi opini atas laporan keuangan namun juga memuat temuan-temuan pemeriksaan baik atas kelemahan sistem pengendalian internal, kepatuhan yang terkait dengan pertanggung jawaban keuangan, serta kinerja. Tugas auditor eksternal tersebut juga sesuai dengan harapan penugasan yang diberikan pimpinan, dan sesuai dengan *term of reference* yang disepakati oleh BPK dengan organisasi internasional yang diperiksa.

Target BPK sebagai pemeriksa eksternal lembaga internasional dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang merupakan salah satu indikator dari sasaran kegiatan pelayanan kehumasan dan kerja sama internasional. Peran BPK sebagai pemeriksa eksternal sejalan dengan salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu optimalisasi kebijakan luar negeri di antaranya melalui peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional serta peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global. Hal tersebut juga dalam rangka mewujudkan visi BPK di antaranya melalui peran aktif BPK dalam mengadopsi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda nasional dan global.

Target pertama terkait peran BPK sebagai pemeriksa eksternal yakni mengenai kuantitas. Di dalam dokumen Renstra BPK tersebut dinyatakan bahwa

target BPK adalah satu pemeriksaan pada tahun 2020, dua pemeriksaan pada tahun 2021, dua pemeriksaan pada tahun 2022, dan masing-masing satu pemeriksaan pada tahun 2023 dan 2024.

Dalam realisasinya, pada tahun 2023 BPK telah melaksanakan satu pemeriksaan atas International Maritime Organization (IMO). Sedangkan untuk tahun 2024 ini, BPK melaksanakan 3 pemeriksaan atas Organisasi Internasional yaitu IMO, World Intellectual Property Organization (WIPO) dan Inter Parliamentary Union (IPU).

Target kedua adalah target jangka panjang BPK yaitu menjadi *member* dari UN Board of Auditor, yaitu bersama dua SAI lainnya BPK menjadi pemeriksa atas 26 entitas di UN, yang terdiri dari 23 organisasi internasional dan tiga *projects*. Dengan menjadi *member* dari UN BoA ini, BPK akan bertugas melakukan pemeriksaan atas UN agencies ini selama enam tahun. Namun, perjuangan ini membutuhkan komitmen yang kuat dan sumber daya yang tidak sedikit. Untuk itu BPK harus menjalin kerja sama yang erat dengan parlemen, Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri karena pada hakikatnya menjadi UN BoA bukanlah mewakili kelembagaan BPK melainkan menjadi representasi Indonesia di PBB.

"Peran BPK sebagai pemeriksa eksternal sejalan dengan salah satu sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu optimalisasi kebijakan luar negeri di antaranya melalui peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional serta peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global."

"Dipercayanya BPK sebagai pemeriksa eksternal di berbagai macam lembaga internasional tersebut merupakan suatu prestasi yang cukup membanggakan, karena BPK telah berhasil bersaing dengan lembaga pemeriksa negara-negara lain yang juga ingin melakukan pemeriksaan atas entitas internasional tersebut."

Manfaat bagi pemeriksa

Kegiatan pemeriksaan BPK di sejumlah lembaga internasional memberikan manfaat termasuk dalam pengembangan kapasitas di dalam negeri. Pusat Kemitraan Global (PKG) BPK dan Biro SDM telah berkoordinasi dalam membentuk dan mengelola kelompok keahlian *external auditor* (EA), untuk menjaring personel BPK yang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam melaksanakan pemeriksaan atas lembaga internasional. Pembentukan kelompok keahlian tersebut dilakukan melalui proses seleksi untuk mendapatkan tim terbaik sebagai pelaksana pemeriksaan yang membawa nama BPK di kancah internasional.

Selanjutnya, setelah selesai pelaksanaan pemeriksaan, tim pemeriksa dapat berbagi pengetahuan dan pengalamannya melakukan pemeriksaan internasional melalui *Knowledge Transfer Forum* (KTF) ataupun *Forum Discussion Group* (FGD) kepada para pemeriksa/personel BPK lainnya yang tidak mengikuti pemeriksaan atas lembaga internasional, misalnya pengetahuan terkait standar-standar dalam pemeriksaan internasional.

Selain itu, pemeriksa eksternal juga dapat berperan dalam penyebaran etos kerja yang baik, serta kemampuan komunikasi dan kerja sama efektif yang diperoleh dalam pengalaman pemeriksaan internasionalnya kepada para rekan-rekan sejawatnya.

Keberhasilan BPK sebagai pemeriksa eksternal juga terlihat dari aktifnya peran BPK dalam pemeriksaan di berbagai lembaga internasional seperti IAEA, IMO, serta pemeriksaan lainnya atas WIPO dan IPU di tahun 2024. Dipercayanya BPK sebagai pemeriksa eksternal di berbagai macam lembaga internasional tersebut merupakan suatu prestasi yang cukup membanggakan, karena BPK telah berhasil bersaing dengan lembaga pemeriksa negara-negara lain yang juga ingin melakukan pemeriksaan atas entitas internasional tersebut.

Selain itu, berulangnya BPK menjadi pemeriksa eksternal di lembaga internasional seperti IMO juga menunjukkan apresiasi dan kepuasan *stakeholders* atas hasil pemeriksaan serta rekomendasi BPK yang dapat ditindaklanjuti dan diterapkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini menunjukkan sikap profesional, integritas, dan independensi para pemeriksa BPK yang ditugaskan, yang sebelumnya telah melewati proses seleksi yang ketat di internal BPK, serta terjaganya kualitas hasil audit dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholders*.



BPK memperoleh penghargaan

Special Recognition Awards for Collaboration on Improving Audit and Financial Management Performance of ADB-Financed Projects Tahun 2023.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan keputusan manajemen Asian Development Bank (ADB) dan disampaikan dalam acara Wrap Up Meeting ADB Country Portfolio Review Mission 2024 di Jakarta, pada Kamis (28/4).



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



[BPK RI Official](https://www.youtube.com/BPKRIOfficial)



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



wartapemeriksa.bpk.go.id





Menjaga Langkah Penyehatan Sang Hyang Seri

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan kinerja atas upaya manajemen dalam meningkatkan omzet penjualan benih dan beras, menekan harga pokok produksi beras, serta mengoptimalkan aset tanah dan bangunan pada PT Sang Hyang Seri (SHS) Tahun 2020 sampai semester I 2022 dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Salah satu alasan pemeriksaan kinerja tersebut dilakukan karena selama 10 tahun terakhir PT SHS kerap mengalami kerugian. Selain itu, pemeriksaan dilakukan berkaitan dengan adanya penggabungan PT Pertani (Persero) ke PT SHS.

Dari pemeriksaan itu, BPK mencatat sejumlah upaya yang sudah dilakukan manajemen PT SHS untuk meningkatkan omzet penjualan benih dan beras, menekan harga pokok produksi beras, serta mengoptimalkan aset tanah dan bangunan. Hal itu antara lain merencanakan target penjualan yang telah mempertimbangkan usulan dari cabang dan unit pemasaran dan melakukan penjualan benih kepada *government market* secara optimal.

SHS juga telah memiliki sistem dan prosedur pengendalian pengeluaran biaya produksi beras yang dapat menggambarkan alur pengeluaran biaya produksi beras secara keseluruhan dan pencapaian rendemen produksi beras yang telah sesuai dengan standar industri perberasan. SHS juga menggunakan mekanisme imbal jasa natura dalam kerja sama pemanfaatan lahan teknis di areal Kantor Produksi Kebun Sukamandi (KPKS) dan telah menginventarisasi dan memetakan seluruh aset tanah dan bangunan yang *idle* yang memiliki potensi pendapatan.

Kendati demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan antara lain yakni kinerja keuangan PT SHS tidak memadai dan berdampak pada kepastian keberlangsungan usaha. Hal tersebut ditunjukkan dengan kinerja keuangan PT SHS mengalami penurunan tiap tahun dan tidak memberikan kontribusi kepada negara serta proporsi penjualan benih dan beras PT SHS terhadap kebutuhan nasional tidak signifikan.

Kemudian, penyusunan dan evaluasi rencana pemasaran benih dan beras belum spesifik dan terukur. Divisi Penjualan Benih dan Beras belum pernah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah tenaga pemasar yang ada di cabang/ unit pemasaran dalam melayani penjualan/ pemasaran di wilayahnya. Selain itu, PT SHS belum memanfaatkan saluran pemasaran benih dan beras melalui kios, distributor, grosir, retail, hotel, restoran dan katering secara optimal. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan belum adanya strategi pemasaran benih dan beras yang rinci pada setiap saluran pemasaran, pemetaan target pelanggan potensial untuk setiap wilayah pemasaran dan jadwal kunjungan tenaga pemasar secara berkala dan pendokumentasiannya.

Upaya PT SHS dalam menekan biaya bahan baku produksi beras juga dinilai belum optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh belum adanya pengaturan proporsi pembayaran pembelian bahan baku pada Unit Penggilingan Padi (UPP), hasil produksi KPKS belum diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pada UPP terdekat dan pembelian bahan baku lebih banyak dalam bentuk beras daripada gabah.

BPK juga menemukan upaya pemanfaatan areal lahan persawahan KPKS belum didukung dengan kebijakan penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang memadai. Hal tersebut ditunjukkan antara lain dengan kegiatan tebar tanam budidaya padi tidak dilakukan secara tepat waktu dan serentak serta belum optimalnya kegiatan penanganan OPT.

BPK menyatakan, apabila permasalahan tersebut di atas tidak segera diatasi, maka dapat menghambat upaya PT SHS dalam meningkatkan omzet penjualan benih dan beras, menekan harga pokok produksi beras, dan mengoptimalkan aset tanah dan bangunan.



"Divisi Penjualan Benih dan Beras belum pernah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah tenaga pemasar yang ada di cabang/unit pemasaran dalam melayani penjualan/pemasaran di wilayahnya. Selain itu, PT SHS belum memanfaatkan saluran pemasaran benih dan beras melalui kios, distributor, grosir, retail, hotel, restoran dan katering secara optimal."



PTSANGHYANGSERI.CO.ID

BPK pun merekomendasikan kepada Direksi PT SHS antara lain agar berkoordinasi dengan PT RNI selaku *holding* untuk menyusun langkah-langkah strategis penyehatan PT SHS yaitu dengan memperbaiki struktur permodalan, utang dan modal keseluruhan sehingga kapasitas *leverage* lebih meningkat. Opsi untuk melikuidasi PT SHS termasuk dalam salah satu pertimbangan dalam program penyehatan PT SHS.

Direksi juga perlu melakukan analisis beban kerja tenaga pemasar dengan memperhitungkan luas cakupan wilayah kerja dan jumlah target pelanggan dan mengalokasikan tenaga pemasar benih dan beras sesuai dengan perhitungan analisa beban kerja baik dari divisi penjualan maupun unit kerja lain.

BPK juga merekomendasikan Divisi Penjualan Benih dan Beras melakukan pemetaan target pelanggan potensial di setiap wilayah cabang pemasaran dan menetapkan strategi atau pedoman bagi tenaga pemasar untuk melakukan kunjungan ke pelanggan dengan mencantumkan target, jadwal dan dokumentasi kunjungan.

Direksi PT SHS perlu mengatur proporsi pembayaran pembelian bahan baku atas produk beras yang diserahkan UPP ke kantor cabang pemasaran dan menetapkan strategi pemenuhan bahan baku UPP dari hasil KPKS untuk meminimalkan biaya bahan baku. Kemudian, juga perlu menetapkan dan menerapkan kebijakan teknis jadwal tebar tanam budidaya padi yang ideal untuk lahan KPKS.

Atas temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, PT SHS menerima temuan dan kesimpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.



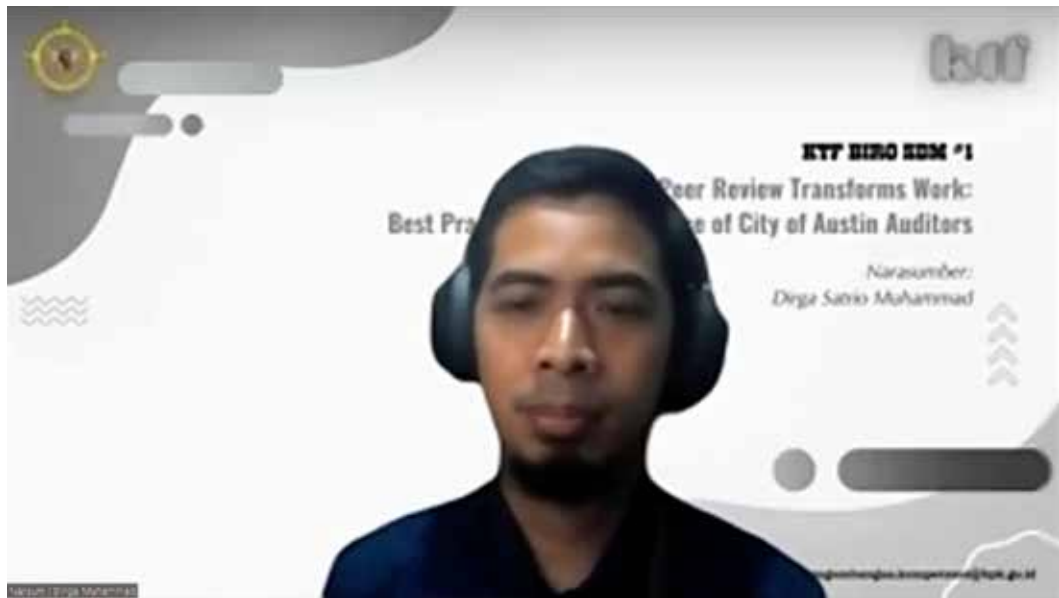
BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

BPK RI Official



wartapemeriksa.bpk.go.id

Meningkatkan Mutu Audit dengan *Peer Review*



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya untuk terus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dengan menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Oleh karena itu, BPK pun turut diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan negara lain atau *Supreme Audit Institution* (SAI). Proses tersebut dikenal dengan istilah *peer review*.

Penelaah Teknis Kebijakan BPK, Dirga Satrio Muhammad, yang pernah menjalani *secondment* di Office of City Auditors (OCA) di Austin, Texas, Amerika Serikat, mengatakan, setiap organisasi audit yang melakukan hubungan antarlembaga, maka berdasarkan Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS), harus memperoleh eksternal *peer review* yang dilakukan oleh lembaga independen.

Segala aktivitas audit harus melalui kualitas asesmen, baik dari internal maupun eksternal. OCA melakukan *peer review* baik dengan ALGA (Assosiation Of Local Government Auditors (ALGA) dan dengan *supreme audit institution* (SAI) Amerika Serikat, yaitu US Government Accountability Office (GAO).

"Lalu sebenarnya apa itu *peer review*? Sebagai lembaga negara, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga BPK membutuhkan penelaahan setiap kegiatan pemeriksaan," kata Dirga dalam kegiatan Knowledge Transfer Forum bertajuk "*How Peer Review Transforms Work: Best Practices From the Office of City of Austin Auditors*", beberapa waktu lalu.

Melalui *peer review*, BPK ditelaah oleh badan pemeriksa negara lain. "Langkah ini untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan standar dan sistem pengendalian mutu. Badan pemeriksa keuangan negara lain tersebut ditunjuk oleh BPK setelah mendapat pertimbangan DPR, Sesuai Pasal 33, UU 15 Tahun 2006," tutur dia.

Fokus *peer review* 2024

Menurut Dirga, ada tiga hal yang menjadi fokus dalam *peer review* 2024 yang akan dijalankan BPK. Pertama adalah etika. Etika merupakan hal penting dalam membangun reputasi dan kepercayaan. Penerapan kode etik, serta kebijakan dan sistem mendorong akuntabilitas, transparansi, dan tata Kelola yang baik

Kedua, sumber daya manusia. Dia menjelaskan, SDM adalah aset BPK yang paling berharga bagi BPK. Kualitas SDM memengaruhi kualitas pemeriksaan BPK.

Ketiga, adalah teknologi informasi (TI). TI mendukung pencapaian visi dan misi BPK serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas BPK. BPK terus mengembangkan pemeriksaan berbasis TI secara berkelanjutan.

Dirga menjelaskan, BPK sebelumnya sudah empat kali menjalani *peer review*. *Peer review* pertama dilakukan oleh the Office of the Auditor General (OAG) New Zealand pada tahun 2004, kemudian Algemene Rekenkamer (ARK) Belanda atau Netherland Court of Audit di tahun 2009, dan Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) Polandia di tahun 2014.

Berbeda dengan *peer review* sebelumnya, pada 2019, *peer review* dilakukan dengan metode *joint review* yakni direviu oleh 3 SAI negara lain yakni dengan *Team Leader* dari NIK Polandia sedangkan anggota tim masing-masing dari The Office of the Auditor General of Norway (OAG) Norwegia dan National Audit Office of Estonia (NAOE) Estonia.

Sedangkan pada tahun ini, *peer review* BPK dilakukan oleh SAI Jerman, SAI Swiss, dan SAI Austria. Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2024.

Dirga menambahkan untuk di Amerika Serikat, GAO telah menerapkan praktik *peer review* sejak dua dekade yang lalu. Awalnya dimulai dengan *peer review* audit keuangan pada tahun 1995. Praktik ini berkembang pesat hingga melibatkan audit kinerja dan campuran antara audit kinerja dan keuangan pada tahun 2022.

Pada intinya, *peer review* adalah suatu proses di mana lembaga audit dievaluasi oleh lembaga audit lain yang independen. Proses ini mencakup pemeriksaan kebijakan dan prosedur, independensi, kompetensi tim audit, dokumentasi audit, dan laporan audit.





WIRESTOCK-FREEPIK

"Penting untuk memahami *peer review* lebih merupakan peninjauan terhadap proses audit dan kepatuhan terhadap standar, bukan evaluasi menyeluruh seperti dalam audit biasa."

Penelaah Teknis Kebijakan BPK,
Dirga Satrio Muhammad

Pentingnya *peer review* terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kualitas audit, memastikan kepatuhan terhadap standar yang berlaku, dan memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan tentang integritas lembaga audit.

"Penting untuk memahami *peer review* lebih merupakan peninjauan terhadap proses audit dan kepatuhan terhadap standar, bukan evaluasi menyeluruh seperti dalam audit biasa."

Peer review juga tidak bersifat obligatif, tetapi merupakan praktik yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi audit.

Salah satu manfaat utama dari pelaksanaan *peer review* adalah kemampuannya untuk pertukaran *best practice* antara lembaga audit, memungkinkan pembelajaran dari pengalaman dan proses yang berbeda.

Melalui *peer review*, lembaga audit dapat membangun jaringan kerja sama, meningkatkan kredibilitas mereka sebagai institusi audit, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas dan transparansi.

Namun, tantangan juga hadir dalam pelaksanaan *peer review*, termasuk alokasi waktu dan sumber daya yang memadai, pemahaman yang jelas tentang objektif dan tujuan *peer review*, serta kemampuan untuk mengakomodasi perubahan dalam kebijakan dan standar audit.

Dalam menjalankan *peer review* yang sukses, perencanaan, persiapan, dan komunikasi yang baik antara para *reviewer* menjadi kunci. Selain itu, digitalisasi proses audit dapat mempermudah akses dan pengelolaan informasi yang diperlukan dalam *peer review*. Untuk lembaga audit seperti Badan Pemeriksa Keuangan, partisipasi dalam praktik *peer review* dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas dan transparansi audit.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perpustakaan Riset

JAM PELAYANAN
Senin-Jumat

07.30
-
15.30

**TERBUKA
UNTUK UMUM**

Koleksi produk-produk BPK yang tidak dijumpai di perpustakaan lain



Gedung BPK RI lantai 2
Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat

**Desain
Ruangan
Menarik**



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://www.x.com/bpkri)



08111907010



[BPK RI Official](https://www.youtube.com/BPKRIOfficial)



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



wartapemeriksa.bpk.go.id

SAI20 Sepakat Kawal Krisis Iklim, Kelaparan, dan Kemiskinan



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia berpartisipasi aktif dalam kegiatan Senior Officials Meeting (SOM) SAI20 yang dilaksanakan di Federal Court of Accounts of Brazil (TCU), Brasília, Brazil. Acara yang berlangsung dari 15 hingga 18 April 2024 ini mengusung tema "Climate Financing and Poverty & Hunger Alleviation".

Kegiatan SOM tahun 2024 menghasilkan penyusunan komunikasi versi pertama yang berisi rekomendasi prioritas dari SAI bagi pemerintah untuk mempromosikan tindakan yang lebih efisien dan efektif terhadap krisis iklim, kelaparan, dan kemiskinan.

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan, SAI20 adalah forum non-politik yang terdiri dari Lembaga Audit Tinggi dari negara-negara anggota G20, didirikan dan diinisiasi oleh BPK pada tahun 2022 selama Presidensi G20 Indonesia. Forum ini bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas global, khususnya dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan mencapai target SDGs (Sustainable Development Goals).

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional Raden Yudi Ramdan Budiman menghadiri Senior Officials Meeting (SOM) SAI20 yang dilaksanakan di Federal Court of Accounts of Brazil (TCU), Brasília, Brazil.



Pada tahun 2023, Presidensi SAI20 beralih ke Comptroller and Auditor General (CAG) India dan pada tahun 2024, presidensi dipegang oleh Tribunal de Contas da União (TCU) Brasil.

BPK memainkan peran strategis dalam diskusi pada acara SOM serta memberikan masukan terkait prioritas konsep rekomendasi dalam draf komunike.

Dalam sesi diskusi, Bahtiar menyebut, BPK memberikan beberapa masukan penting dan berbagi pengalaman kepada lembaga pemeriksa lainnya.

Alasannya karena SAI20 menjadi forum penting dimana pengalaman bisa dibagikan kepada para pemimpin G20.

“Bagi para pemimpin G20, hasil dari SAI20 amat penting karena mempunyai dampak besar bagi masyarakat Anda. Apalagi terkait anggaran negara untuk menjaga kesejahteraan, keberkelanjutan, dan kesetaraan bagi siapapun warga negara,” kata Bahtiar.

Rekomendasi prioritas untuk pemerintah G20 berupa mengakui keterkaitan antara kemiskinan, kelaparan, transisi energi yang adil, dan pembiayaan iklim. Selain itu,

memahami pentingnya pendanaan yang memadai untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan efisien. Kemudian, mengembangkan kebijakan yang mendorong investasi untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, transisi energi, dan pembiayaan iklim.

Berikutnya adalah indikator komprehensif untuk mengukur dan memantau kemiskinan multidimensi serta kemajuan dalam transisi energi dan pembiayaan iklim.

Selain Sekjen Bahtiar Arif, delegasi Indonesia yang hadir dalam acara ini, antara lain, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional Raden Yudi Ramdan Budiman, Kepala Subbagian Kerja Sama Multilateral Adinda Aan Fertina, Pemeriksa Ahli Muda Rahmi Dwi Istanti.

Dalam kegiatan tersebut, BPK juga melaporkan tindak lanjut komitmen G20 dan SAI20 tahun 2022, serta berbagi pengalaman dalam mengaudit tema SAI20 2024, termasuk upaya memerangi kelaparan dan kemiskinan serta pembiayaan iklim.

Partisipasi BPK dalam SAI20 sangat penting untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi tentang tantangan dan solusi dalam meningkatkan partisipasi SAI dalam tema transisi energi dan pembiayaan iklim serta pengentasan kelaparan dan kemiskinan.

Diskusi dalam SOM membuahkan output berupa penyusunan *Draft Communique* SAI20 dengan mengonsolidasikan pemahaman umum seputar isu-isu tersebut yang dibahas pada tataran teknis.

Lewat partisipasi aktif dalam SAI20, BPK Indonesia terus berkomitmen mendukung transparansi dan akuntabilitas global guna menciptakan tata kelola yang lebih baik di berbagai sektor.



BPK Soroti Peran Sentral SAI dalam Hadapi Perubahan Iklim di Wina

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyoroti pentingnya peran sentral badan pemeriksa dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terus berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terkait iklim secara efektif, sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan Paris Agreement.

Hal ini disampaikan Ketua BPK Isma Yatun saat melakukan presentasi terkait pengalaman dalam pemeriksaan perubahan iklim dalam Simposium UN/INTOSAI ke-26 di Vienna International Center, Wina, Austria pada 16 sampai 18 April 2024.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh INTOSAI bekerja sama dengan PBB setiap dua tahun sekali ini dihadiri oleh 224 peserta dari 82 *supreme audit institutions* (SAI) di seluruh dunia. Kali ini, simposium mengangkat tema "Implementation

of SDG 13 on climate action: Role, contribution and experience of Supreme Audit Institutions (SAIs)".

Simposium ini pun menyoroti praktik-praktik SAI dalam memeriksa dampak perubahan iklim, kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk memeriksa tindakan iklim, dan penguatan tindakan iklim melalui hasil pemeriksaan perubahan iklim. Simposium dibuka oleh INTOSAI Secretary General Margit Kraker, Under-Secretary-General for Economic Development, UNDESA Li Junhua, dan Chair of the INTOSAI Governing Board Bruno Dantas.

Dalam kesempatan itu, Isma Yatun juga menegaskan kerentanan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar terhadap risiko perubahan iklim dan strategi komprehensif yang telah diintegrasikan dalam prioritas nasional. Pemeriksaan BPK berfokus pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dengan penekanan khusus pada kontribusi sektor energi terhadap emisi gas rumah kaca.



"Kerentanan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar terhadap risiko perubahan iklim dan strategi komprehensif yang telah diintegrasikan dalam prioritas nasional."

Ketua BPK, Isma Yaton

Dalam hal mitigasi perubahan iklim, BPK telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas kebijakan, peraturan dan investasi dalam mendorong transisi energi dengan mengurangi ketergantungan atas bahan bakar fosil. Pemeriksaan tersebut telah mempengaruhi perubahan peraturan terkait energi terbarukan yang mendorong investasi dan pengembangan infrastruktur. Dampak dari hasil pemeriksaan BPK antara lain berkontribusi pada meningkatnya ketersediaan suplai atas energi terbarukan.

Terkait adaptasi perubahan iklim, pemeriksaan BPK fokus pada *water resources management* dan *disaster management*. Hasil pemeriksaan mendorong kolaborasi pemerintah, sektor privat, organisasi non-profit, dan masyarakat lokal untuk mendorong pembangunan

infrastruktur penyediaan air serta mendorong tindakan proaktif untuk melakukan mitigasi atas risiko-risiko yang timbul.

Selain sebagai pembicara, BPK juga berperan sebagai moderator dalam sub-theme 3: Strengthening Climate Action-Impacts of Climate Change Audits. Kesempatan ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Edward G H Simanjuntak. Partisipasi BPK dalam simposium ini menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya global dalam menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Perkuat Spiritual Pegawai, BPK Resmikan Mushola Baitul Hasib di Perwakilan Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara meresmikan Mushola Baitul Hasib sebagai bagian dari upaya memfasilitasi kebutuhan spiritual dan sosial para pegawai serta masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, BPK menilai mushola juga bagian dari pendidikan dan penanaman nilai-nilai Islam.

Dalam sambutannya, Ketua BPK Isma Yatun menyatakan kebanggaannya atas upaya kolektif dalam mewujudkan mushola ini. Ia menekankan pentingnya keberadaan mushola sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai moral bagi seluruh pegawai dan masyarakat.

"Keberadaan mushola tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai tempat pendidikan dan penguatan nilai-nilai bagi umat Islam, termasuk menanamkan dan mengokohkan nilai-nilai dasar BPK serta nilai-nilai ASN Ber-Akhlak," ujar Isma Yatun.

Ketua BPK juga mengapresiasi dedikasi seluruh pegawai yang terlibat dalam proses renovasi dan pembangunan mushola ini.

"Kegiatan merenovasi mushola Baitul Hasib sangatlah baik dan mulia. Selain meraih keberkahan dan amal jariyah, juga memberikan lebih banyak manfaat bagi pegawai di lingkungan kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dan masyarakat sekitar pada umumnya," jelasnya.

Ketua BPK menambahkan, sebagai salah satu ikhtiar untuk memakmurkan mushola ini juga digelar pengajian dan doa bersama. Serta dilanjutkan dengan kegiatan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak dari Yayasan Panti Asuhan Nurul Hidayah.

Peresmian mushola ini juga diisi dengan pengajian dan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz H Ramli Abbas. Amk, serta kegiatan berbagi kebahagiaan dengan anak-anak dari Yayasan Panti Asuhan Nurul Hidayah.

Musholla Baitul Hasib diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan yang aktif, perekat silaturahmi dalam kebaikan, serta menguatkan doa dan upaya seluruh pegawai BPK dalam menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme.



Ketua BPK Isma Yatun meresmikan Musholla Baitul Hasib BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.



"Melalui hadirnya Mushola Baitul Hasib ini, dapat menjadi pusat kegiatan pendidikan keagamaan, perekat silaturahmi dalam kebaikan sekaligus menguatkan doa dan upaya kita agar seluruh pegawai di BPK Perwakilan Sulut senantiasa saling menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme dimanapun berada," kata dia.

Peresmian Mushola Baitul Hasib ini mencerminkan komitmen BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dalam mendukung kesejahteraan spiritual dan sosial para pegawai serta masyarakat sekitar, menjadikannya sebagai contoh nyata dari integrasi nilai-nilai agama dalam kehidupan profesional.

Acara peresmian ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Ustadz H Ramli Abbas. Amk, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Manado, dan beberapa pejabat tinggi BPK, yaitu Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Arief Fadillah, Kepala Biro Umum Muhammad Rizal Assiddiqie, dan Kepala Auditorat VI.A Thomas Ipoeng Andjar Wasita.



▲ Ketua BPK Isma Yatun meresmikan Masjid Baitul Hasib BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Peresmian Masjid Baitul Hasib di Kantor Perwakilan Kalbar

Badan Pemeriksa Keuangan secara resmi membuka Masjid Baitul Hasib di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat setelah renovasi dan perluasan selesai. Acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Ketua BPK Isma Yatun serta Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat Wahyu Priyono.

Renovasi dan perluasan masjid ini merupakan bagian dari upaya BPK untuk menyediakan fasilitas ibadah yang lebih baik bagi para pegawainya serta masyarakat sekitar. Nama "Baitul Hasib" sendiri memiliki makna yang mendalam, yakni tempat penghisaban atau perhitungan, yang mengingatkan jamaah akan pentingnya introspeksi dan persiapan menghadapi kehidupan akhirat.

BPK sesuai makna dari Baitul Hisab juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan memanfaatkan ilmu serta harta sesuai dengan kehendak Allah SWT.

BPK juga berharap masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan umat yang dapat mencerdaskan bangsa.

Suksesnya renovasi dan perluasan Masjid Baitul Hasib tidak lepas dari kerja keras panitia dan dukungan berbagai pihak. Partisipasi dari masyarakat, baik dalam bentuk pikiran, tenaga, maupun materi, sangat membantu terealisasinya proyek ini. Sehingga ke depannya, Masjid Baitul Hasib diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan yang memakmurkan umat.

Sri Mulyani: APBN Berhasil Melalui Gelombang Dinamika Global

Pemerintah telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *Unaudited* kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk selanjutnya diperiksa. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam sambutannya pada *Entry Meeting* Pemeriksaan LKPP mengapresiasi peran BPK yang terus mengingatkan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.

"Kami berterima kasih terus diingatkan bagi kami semua di jajaran pemerintah eksekutif untuk terus menerus mengelola dan menggunakan APBN sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan juga pertanggungjawaban yang akuntabel," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyampaikan, LKPP 2023 turut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian baik di lingkungan global maupun domestik. Dia menekankan, tahun 2023 bukan tahun yang mudah karena banyak tantangan yang sudah diprediksi akan mempengaruhi kinerja ekonomi global dan akan mempengaruhi perekonomian nasional. Hal itu mulai masalah geopolitik seperti perang di Ukraina dan kemudian terjadi di Timur Tengah.

Selain itu, tekanan inflasi masih tinggi meskipun lebih rendah dibandingkan 2022. Ini menimbulkan kebijakan bank sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve yang menaikkan suku bunga secara tajam mencapai 5,5 persen atau naik 525 basis poin pada 2023.

"Ini *shock* besar di sektor keuangan dan tidak semua negara mampu menahan implikasinya karena *cost of borrowing* meningkat, begitu juga dengan kurs dolar, dan terjadi *capital outflow* dari negara berkembang," ungkap Sri Mulyani.

IMF juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 hanya sebesar 3,1 persen atau lebih rendah dari 2022 yang sebesar 3,5 persen. Lingkungan dan risiko global tersebut kemudian mempengaruhi ekonomi Indonesia. Hal ini, kata Sri Mulyani, membuat DPR dan pemerintah bersama-sama menetapkan APBN dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi.

Sri Mulyani menyampaikan, APBN 2023 mengemban berbagai peran. Selain menjadi *shock absorber*, APBN 2023 tetap berperan dalam mendukung agenda pembangunan seperti persiapan tahapan pemilu, pembangunan IKN, pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), serta penurunan *stunting* dan kemiskinan ekstrem.

Di sisi lain, ujarnya, pemerintah juga harus mengembalikan kesehatan APBN. Seperti diketahui pada 2020 dan 2021, APBN mengalami tekanan akibat pandemi dan konsolidasi fiskal menjadi tantangan.

"Kami terus melakukan reformasi baik di sisi fiskal dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk mengupayakan APBN kembali sehat," ungkap Sri.

Dari sisi pendapatan negara, pemerintah melakukan mobilisasi pendapatan negara agar tercipta pelebaran ruang fiskal. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta meningkatkan inovasi pelayanan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu juga memperkuat pemanfaatan barang milik negara (BMN) agar lebih produktif.

Pemerintah juga terus berupaya memperbaiki kualitas belanja. Kementerian/lembaga diminta untuk fokus pada berbagai program strategis serta fokus pada kualitas *output* dan *outcome*. Kemudian, dari sisi pembiayaan, pemerintah menggunakan strategi yang tetap hati-hati dan inovatif.

"Kehati-hatian ini perlu dijaga dan *Alhamdulillah* Indonesia tetap berada dalam peringkat risiko utang yang aman," ujarnya.

Dengan berbagai tantangan itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga tetap kuat di level 5,05 persen pada 2023. Sri Mulyani menyebut, ini termasuk tingkat pertumbuhan tertinggi di antara kelompok G20 sesudah India dan Tiongkok.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat di tengah kondisi global yang sangat lemah merupakan prestasi," ungkapnya.



"Kami terus melakukan reformasi baik di sisi fiskal dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk mengupayakan APBN kembali sehat."

**Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati**

Stabilitas ekonomi juga dinilai terjaga baik dengan tingkat inflasi di level 2,6 persen pada saat inflasi global berada di atas 6 persen. Tingkat pengangguran terbuka pun turun dari 5,8 persen menjadi 5,3 persen serta angka kemiskinan turun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 73,7 menjadi 74,39.

Sri Mulyani mengungkapkan pencapaian tersebut ditopang oleh APBN yang mengalami perbaikan. Dia menyampaikan, realisasi APBN menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp2.783,7 triliun atau terealisasi 105,6 persen dari target APBN. Angka itu berhasil tumbuh 5,6 persen dibanding tahun sebelumnya.

"Kenaikan ekuitas pada 2023 menunjukkan kualitas kinerja keuangan yang lebih baik dan ini berasal dari surplus laporan operasional serta peningkatan kinerja investasi. Kenaikan ekuitas tanpa dilakukan revaluasi aset ini terjadi untuk pertama kalinya sejak laporan keuangan berbasis akrual disusun pada 2015."

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati

"Pertumbuhan pendapatan ini tentu ditopang oleh aktivitas ekonomi Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global dan efektivitas dari reformasi perpajakan yang terus dilaksanakan," ujarnya.

Kemudian, dari sisi belanja, telah terealisasi Rp3.121,1 triliun atau 100,1 persen dari pagu belanja. Angka itu tumbuh 0,8 persen.

Menurut Sri, hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi APBN sebagai *shock absorber* terutama untuk melindungi masyarakat dari daya beli yang tergerus akibat tekanan inflasi, menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, dan mendukung serta mencapai berbagai target pembangunan nasional secara optimal.

Dengan hal itu, defisit APBN 2023 adalah sebesar Rp337,4 triliun atau setara 1,61 persen terhadap PDB. Angka itu jauh lebih kecil dari target awal yang kisaran defisitnya 2,8 persen dari PDB.

Selain itu, keseimbangan primer berhasil mencapai surplus sebesar 102,46 triliun. Sri Mulyani mengatakan, pencapaian ini adalah pertama kali sejak 2012.

"Ini menggambarkan konsolidasi fiskal yang berjalan luar biasa cepat dan kuat tanpa mengorbankan kinerja perekonomian nasional yang tetap terjaga," ujarnya.

Kemudian, neraca menyajikan informasi aset pemerintah yakni sebesar Rp12.963,2 triliun. Nilai aset ini berhasil naik 5,2 persen.

Sementara, di sisi kewajiban yakni sebesar Rp9.424,6 triliun atau naik 5,6 persen dengan ekuitas tercatat sebesar Rp3.538,6 triliun atau naik 3,9 persen.

"Kenaikan ekuitas pada 2023 menunjukkan kualitas kinerja keuangan yang lebih baik dan ini berasal dari surplus laporan operasional serta peningkatan kinerja investasi. Kenaikan ekuitas tanpa dilakukan revaluasi aset ini terjadi untuk pertama kalinya sejak laporan keuangan berbasis akrual disusun pada 2015," ujar Sri Mulyani.



Pengamanan Data

01

Cadangkan (*backup*) data secara teratur ke media yang terpisah.

05

Tidak memasang aplikasi yang tidak dipercaya (*bajakan*).

02

Aktifkan fitur Bitlocker.

06

Berhati-hati menggunakan media portabel (*flashdisk, external HDD*).

03

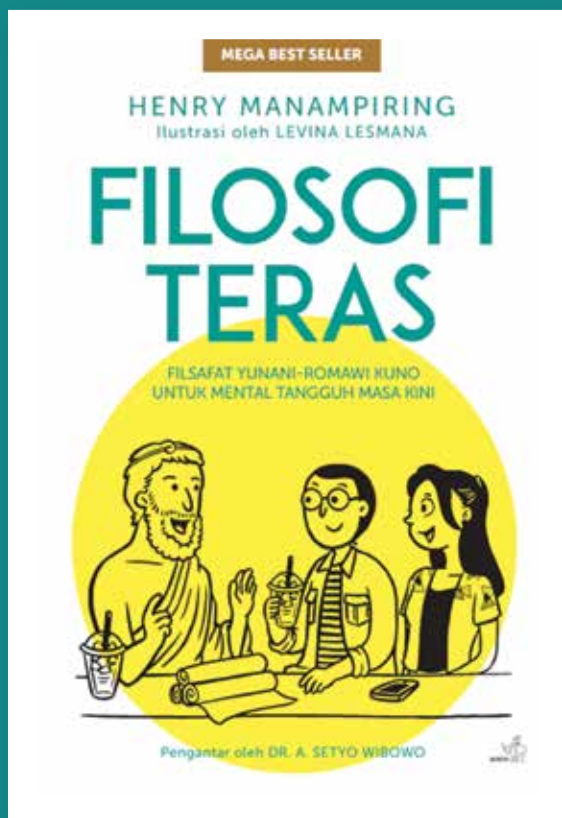
Pahami jenis-jenis file/data dan ciri-cirinya. Memahami *extension file*.

04

Memahami fungsi dasar file
Contoh : file ber-*extension .exe* merupakan file yang dapat dieksekusi oleh windows.



Memahami Stoisisme dan Kebahagiaan Lewat Buku Filosofi Teras



Dalam kehidupan, peristiwa sering kali bersifat netral dan menjadi positif atau negatif tergantung pada makna dan interpretasi yang kita berikan. Mengendalikan emosi negatif dan memaksimalkan hal-hal berguna di bawah kendali kita, menjadi suatu pilihan yang tepat. Fokus pada diri sendiri bukan berarti memutuskan diri dari kehidupan sosial.

Menurut Henry Manampiring dalam bukunya yang berjudul "Filosofi Teras", dengan mengendalikan emosi negatif dan memfokuskan diri pada hal-hal yang berguna di bawah kendali kita, kita bisa mengoptimalkan waktu, pikiran, dan energi secara tepat.

Henry Manampiring, yang sempat didiagnosis menderita depresi, menemukan pencerahan melalui praktik Stoisisme setelah membaca buku "How to Be a Stoic" karya Massimo Pigliucci.

Pengalaman ini mendorongnya untuk menerjemahkan konsep tersebut ke dalam buku "Filosofi Teras". Ia menganalogikan filosofi ini sebagai sistem operasi (*operating system*) bagi manusia, yang dapat membantu mencapai tujuan hidup dengan optimal.

Filosofi Teras, yang berakar dari ajaran Stoisisme lebih dari 2.000 tahun lalu, mengajarkan pentingnya hidup bebas dari emosi negatif dan mengasah kebajikan. Praktisi Stoisisme seperti Seneca, Marcus Aurelius, dan Cato The Younger menjadikan ajaran ini sebagai *way of life* atau jalan hidup.

Ada dua tujuan utama dalam Filosofi Teras. Pertama, hidup bebas dari emosi negatif dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kedua, hidup mengasah kebajikan dengan empat kebajikan utama yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan menahan diri.

"Agar dapat mencapai tujuan utama filosofi teras, hal dasar yang harus diterapkan ialah menjalankan dikotomi kendali. Stoisisme mengajarkan agar tidak mengharapkan kebahagiaan dari hal-hal di luar kendali, karena hal tersebut hanya akan mendatangkan kekecewaan. Justru bahagia datang dengan mengoptimalkan hal-hal berguna yang ada dalam kendali kita."

Dengan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, kita dapat menghindari kekecewaan yang datang dari hal-hal di luar kendali kita.

Henry mengingatkan bahwa opini dan perilaku orang lain, serta situasi politik dan ekonomi global, adalah contoh hal-hal yang berada di luar kendali kita. Sebaliknya, pikiran, keinginan, dan tindakan adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan.

Untuk menghadapi peristiwa buruk, Henry merekomendasikan teknik "Premeditatio Malorum" atau latihan menghadapi kesusahan, yang bertujuan untuk memperkuat mental dan melatih diri untuk lebih tangguh.

Teknik ini melibatkan pemikiran skenario terburuk yang mungkin terjadi sehingga kita dapat menyiapkan diri secara mental.

Dalam konteks kehidupan sosial, Stoisisme tidak mengajarkan untuk bersikap acuh tak acuh. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk memperluas kasih sayang sampai alam semesta dan tetap berkontribusi aktif dalam masyarakat.

Agar dapat mencapai tujuan utama filosofi teras, hal dasar yang harus diterapkan ialah menjalankan dikotomi kendali. Stoisisme mengajarkan agar tidak mengharapkan kebahagiaan dari hal-hal di luar kendali, karena hal tersebut hanya akan mendatangkan kekecewaan. Justru bahagia datang dengan mengoptimalkan hal-hal berguna yang ada dalam kendali kita.

Bahkan, dalam buku ini dijelaskan, William Irvine memperluasnya menjadi trikotomi kendali. Ada yang bisa, tidak bisa, dan sebagian yang kita kendalikan. William memisahkan target internal yang bisa dikendalikan dan hasil yang di luar kendali. Contohnya kesehatan merupakan sebagian di bawah kendali.

Buku "Filosofi Teras" terdiri dari 326 halaman yang dilengkapi dengan data survei, wawancara, dan contoh praktik nyata. Buku ini diakui mampu menyajikan filsafat dengan bahasa yang menarik dan mudah dipahami, menjadikannya relevan dan aplikatif bagi pembaca dari generasi Z, milenial, hingga usia 50-an.

Meskipun ada beberapa kekurangan seperti spasi yang terlalu rapat, buku ini tetap direkomendasikan untuk dibaca dan dipraktikkan sebagai panduan hidup dalam menghadapi ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, kita dapat menciptakan kebahagiaan dan keberhasilan dalam menjalani kehidupan yang dinamis dan penuh tantangan.



Museum BPK RI

Menghadirkan koleksi sejarah seputar BPK

**TERBUKA
UNTUK
UMUM
GRATIS!**



Alamat:

Jl. Diponegoro
No. 1, Magelang

Buka:

Selasa - Minggu

09:00-15:00

(0293) 310230

museum.bpk.go.id

[museum_bpkri](https://www.instagram.com/museum_bpkri)

Wisata edukasi di berbagai ruangan menarik





PRESSFOTO-FREEPIK

Bahagia dengan Memaafkan

Dalam Sharing Time-Spesial Ramadhan Seri III, Employee Care Center (ECC) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengangkat tema terkait kebahagiaan dan memaafkan. Dalam *sharing time* tersebut, ECC mengundang psikolog Kumala Windya yang fokus membahas kebahagiaan dan memaafkan.

Menurut Kumala, kebahagiaan tidak hanya sekadar perasaan senang. Kebahagiaan adalah mengetahui kekuatan tertinggi dalam diri, mengembangkannya, dan menggunakannya untuk melayani sesuatu yang lebih besar. Ini adalah kondisi psikologis positif yang ditandai dengan kepuasan terhadap masa lalu, emosi positif yang tinggi di masa kini, dan rendahnya emosi negatif. Dengan demikian, pandangan masa depan pun menjadi lebih optimis.

Kebahagiaan bersifat relatif dan subjektif. Ini bergantung pada evaluasi kognitif terhadap berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, pekerjaan, dan pengalaman pribadi.

Untuk mengukur kebahagiaan, pertanyaan-pertanyaan sederhana dapat digunakan, seperti "Sejauh mana Anda merasa bahagia dibandingkan dengan teman-teman Anda?" atau "Apakah Anda menikmati hidup dan mendapatkan hasil maksimal dari segala sesuatu?"



SYARIFAHBRIT-FREEPIK

"Dari pertanyaan ini, kita jadi tahu bahwa dari diri kita sendiri dan kadang-kadang kita membandingkan dengan orang lain. Siapa yang sudah kepoin orang lain, hayoo.. dan oh ternyata kepoin status orang itu bikin kita Bahagia, ternyata kekuatan sosial media itu mempengaruhi juga," ucap dia.

Menurut Kumala, Badan Pusat Statistik juga memiliki definisi tersendiri terkait kebahagiaan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kebahagiaan dengan tiga dimensi utama:

Perasaan:

Kebahagiaan, tidak adanya rasa sakit, dan rendahnya emosi negatif.

Kepuasan dalam Kehidupan Sosial:

Keharmonisan keluarga, waktu luang untuk bersosialisasi, dan hubungan sosial.

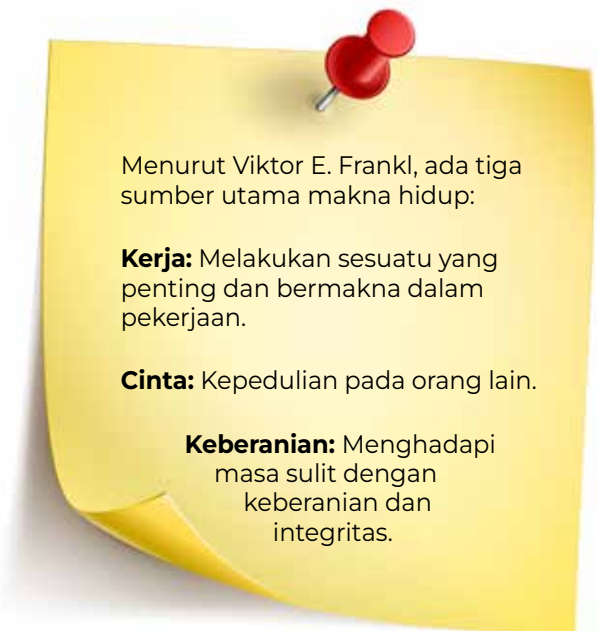
Makna Hidup:

Pengembangan diri dan hubungan bermakna dengan orang lain.

Hasil survei menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di Indonesia adalah Sulawesi dan Sumatera, sementara DIY belum masuk dalam sepuluh besar.

Kebahagiaan Autentik vs Tidak Autentik

Kumala menjelaskan, bahwa sebenarnya, kebahagiaan terbagi dua yaitu kebahagiaan autentik dan tidak autentik. Kebahagiaan autentik adalah kepuasan hidup berdasarkan pengalaman positif yang mendalam dan bermakna. Bahkan pengalaman negatif bisa menjadi sumber kebahagiaan jika dimaknai dengan benar. Dimensi kebahagiaan mencakup kehidupan yang menyenangkan, baik, dan bermakna.



Menurut Viktor E. Frankl, ada tiga sumber utama makna hidup:

Kerja: Melakukan sesuatu yang penting dan bermakna dalam pekerjaan.

Cinta: Kepedulian pada orang lain.

Keberanian: Menghadapi masa sulit dengan keberanian dan integritas.

Konsep Nafs dalam Islam

Dalam Islam, "nafs" adalah aspek kejiwaan dan spiritual yang menggerakkan manusia. Terdapat tiga jenis nafs:

Nafs Lawwamah: Jiwa yang terus-menerus menyalahkan diri sendiri dan penuh penyesalan.

Nafs Ammarah: Jiwa yang cenderung pada hawa nafsu dan keinginan duniawi.

Nafs Mutmainnah: Jiwa yang damai dan puas dengan ketentuan Allah SWT.

Energi dalam Emosi

Emosi memiliki tingkat energi yang berbeda, dari yang terendah (depresi) hingga tertinggi (kebahagiaan). Emosi negatif cenderung lebih dominan, sehingga diperlukan lebih banyak energi positif untuk menjaga keseimbangan.

Kebajikan Utama untuk Kebahagiaan Permanen

Kebahagiaan permanen berasal dari kebajikan utama yang mencakup enam hal:

Kebijaksanaan:

Kreativitas, rasa ingin tahu, berpikir terbuka, cinta belajar, perspektif.

Keberanian:

Kegigihan, integritas, ketahanan.

Kemanusiaan:

Cinta, kebaikan, relasi sosial.

Keadilan:

Kewarganegaraan, kepemimpinan.

Kesederhanaan:

Memaafkan, kasih sayang, rendah hati, kebijaksanaan, regulasi diri.

Spiritual:

Mengapresiasi, bersyukur, harapan, rasa humor, spiritualitas.

Kebajikan memaafkan menjadi salah satu elemen penting dalam kesederhanaan yang dapat membawa kebahagiaan sejati. Memaafkan orang lain dan diri sendiri adalah langkah awal menuju kebahagiaan yang mendalam dan tahan lama.

Dengan memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep ini, kita dapat mencapai kebahagiaan yang lebih bermakna selama bulan Ramadan dan seterusnya. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk introspeksi, memaafkan, dan menjalani hidup dengan lebih damai dan penuh kebahagiaan.

Terkait kebahagiaan, maka menurut dia ada proses memaafkan. Memaafkan adalah proses perubahan pikiran, perasaan, dan tindakan tertentu. Ini melibatkan keputusan untuk tidak melakukan balas dendam, menghilangkan keinginan menjauhi pelaku, dan berusaha berdamai serta berbuat baik terhadap pelaku.

Mengapa Memaafkan?

Ada banyak alasan mengapa kita sulit memaafkan, seperti keinginan untuk menunjukkan bahwa kita benar secara moral, membenaran atas kemarahan, dan anggapan bahwa memaafkan berarti membiarkan pelaku mengulangi perbuatannya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa memaafkan dapat membuat kita lebih tenang, lebih bahagia, dan mengurangi kecemasan.

Proses Penyembuhan

Memaafkan adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesiapan, kemauan, dan keyakinan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Proses ini bisa melibatkan memaafkan diri sendiri, orang lain, situasi, bahkan Tuhan.

Level Memaafkan

Ada berbagai level dalam memaafkan: dari tidak mau memaafkan, merencanakan untuk memaafkan, dalam proses memaafkan, hingga benar-benar memaafkan. Setiap level memerlukan usaha dan kesadaran yang terus-menerus untuk mencapai kedamaian batin.



SYARIFAHBRIT-FREEPIK

Hadiri Forum MIKTA SAIs, BPK Tekankan Pentingnya Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab



▲
Wakil Ketua BPK Hendra Susanto memberikan pemaparan mengenai risiko masa depan di era kecerdasan buatan (AI) pada MIKTA SAIs di Seoul, Korea Selatan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadiri pertemuan perdana badan pemeriksa negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia) atau MIKTA SAIs di Seoul, Korea Selatan, pada 7-9 Mei 2024. Pertemuan yang diikuti BPK, SAI Korea, Turki, dan Australia itu dihadiri Wakil Ketua BPK Hendra Susanto.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua BPK memberikan pemaparan mengenai risiko masa depan di era kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Hendra juga menjelaskan mengenai transformasi digital yang berlangsung di BPK.

Ia mengatakan BPK memandang penting transformasi digital termasuk memanfaatkan Big Data dan AI dalam menjalankan tugasnya. "AI tidak menggantikan manusia, tetapi membuat manusia lebih efisien dan efektif," ujarnya. Pernyataan ini disampaikan Hendra untuk menanggapi kekhawatiran bahwa AI dapat mengancam pekerjaan manusia.

Apalagi, menurut dia, AI dapat merevolusi cara menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan mendeteksi anomali. Selain itu, AI dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit.



Hanya saja, Hendra mengingatkan bahwa meskipun AI memiliki potensi besar, terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai. "AI bisa memperkuat ketidakadilan jika data di lapangan tidak tepat dan bias. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam AI harus dijaga," jelasnya.

Selain itu, ada risiko ketergantungan berlebihan pada AI yang dapat menghasilkan keputusan yang tidak akurat. AI amat bergantung pada algoritma yang mungkin mengandung bias atau kesalahan.

"Oleh karena itu, sebagai auditor, kita harus menjaga pola pikir kritis, skeptisisme, dan profesional untuk menafsirkan hasil yang ditunjukkan AI," katanya.

Selain itu, kecepatan inovasi teknologi, harus diimbangi dengan regulasi yang jelas. "Auditor harus memastikan bahwa aplikasi AI mematuhi undang-undang, standar, dan kode etik yang ada, termasuk privasi dan keamanan data," tegasnya.

Ia juga menyebutkan potensi risiko tergantikannya pekerjaan manusia oleh AI. Namun, Hendra melihat ini sebagai peluang bagi auditor untuk meningkatkan keterampilan mereka dan fokus pada tugas-tugas bernilai lebih tinggi seperti analisis strategis dan penilaian risiko.

Hendra menyoroti risiko kesenjangan digital dimana tidak semua auditor memiliki akses yang sama terhadap alat AI. "Penting

bagi kita untuk bekerja sama untuk mendemokratisasikan akses teknologi AI dan memastikan semua auditor dapat merasakan manfaatnya," ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, Hendra mendorong lembaga pemeriksa untuk mengadopsi konsep "Fairness by Design" dalam setiap proyek AI dan membangun tata kelola AI yang kuat. Ia menekankan pentingnya keadilan data dan algoritma dalam pengembangan AI yang bertanggung jawab.

Data menjadi sumber dari kemampuan AI, sehingga semua perlu memastikan bahwa data yang digunakan bersih, tidak memihak, dan valid untuk mencerminkan keberagaman masyarakat. "Kita juga harus transparan dalam pengumpulan data seperti jenis dan sumbernya begitu juga dengan penggunaannya."

Pendekatan yang hati-hati dalam menerapkan algoritma juga dimaksudkan untuk mengurangi potensi bias dari AI yang dirancang dengan buruk. Pada intinya, meskipun AI membawa risiko, ia juga menawarkan peluang inovasi dan pertumbuhan yang belum pernah ada sebelumnya.

"Dengan mengadopsi AI secara bertanggung jawab dan menjaga pikiran kritis, kita bisa mengatasi risiko dan tantangan di masa depan serta menjadi lebih kuat dan tangguh," tutupnya.

Polri Diminta Buat Perencanaan Anggaran yang Baik

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diminta untuk dapat membuat perencanaan anggaran yang baik. Dengan begitu dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya setiap tahun.

"Di akhir periode laporan keuangan, Polri diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang digunakan dan dikelola untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana.

Hal itu disampaikan saat memberikan ceramah umum di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri di gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Dalam ceramahnya Anggota I BPK menjelaskan tentang tugas dan fungsi BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian kaitan antara rencana strategis BPK dengan rencana strategis pemerintah dan Polri.

Dalam ceramah yang bertajuk "Akuntabilitas Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Mendukung Polri Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan (PRESISI) serta Melayani untuk Indonesia Maju" itu, Anggota I BPK juga memaparkan terkait tugas dan kewenangan Polri sebagai pengelola anggaran.

Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dengan banyaknya tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, Polri juga berfungsi sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang.



"Di akhir periode laporan keuangan, Polri diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang digunakan dan dikelola untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan."

**Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
Anggota I BPK,
Nyoman Adhi Suryadnyana**



Menurut Anggota I BPK, Polri berbeda dengan lembaga atau kementerian lain yang aktivitas tugasnya cenderung bersifat teratur, statis, serta dapat direncanakan atau diprediksi. Pelaksanaan tugas Polri cenderung bersifat dinamis, tergantung dari situasi dan kondisi keamanan serta ketertiban masyarakat yang dihadapi.

Karenanya, kata dia, dalam perencanaan anggaran, Polri perlu memiliki kemampuan yang baik. Ini antara lain pengetahuan

di bidang keuangan dan pengalaman empiris manajemen operasi dan kegiatan Polri.

"Kuasa pengguna anggaran (KPA) sebagai pejabat berwenang dan berfungsi untuk melakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka KPA di lingkungan Polri harus dapat memastikan bahwa anggaran yang dimiliki dapat digunakan secara optimal, fleksibel, dapat mencukupi seluruh kebutuhan pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun namun tetap harus tetap akuntabel," ujar dia.

Anggota V BPK: Setiap Rupiah APBN/APBD Bukan Sekadar Angka dalam Laporan



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2023 oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Andra Soni, dan Penjabat (PJ) Gubernur Banten AI Muktabar, di kantor DPRD Provinsi Banten, Jumat (5/4/2024).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengingatkan bahwa penggunaan uang negara harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karenanya, penggunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN)/anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) harus dapat dijalankan dengan efektif dan efisien.

"Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN/APBD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan representasi dari kepercayaan publik dan harapan masyarakat akan peningkatan kualitas hidup mereka," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit.

Hal ini disampaikan oleh Anggota V saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tahun 2023, di kantor DPRD Provinsi Banten, Jumat (5/4/2024). LHP diserahkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten Andra Soni, dan Penjabat (PJ) Gubernur Banten Al Muktabar.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan selamat kepada Provinsi Banten yang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan (LK) tahun 2023. Meskipun begitu, dia mengingatkan pemprov untuk memberikan perhatian atas empat permasalahan yang ditemukan.

Permasalahan pertama adalah mengenai pengelolaan pajak air permukaan yang belum optimal. Terdapat 17 perusahaan yang memanfaatkan air permukaan, namun belum memiliki Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA). Sehingga pendapatan pajak air permukaan belum diperoleh Pemprov Banten.

"Prestasi ini hendaknya memotivasi para pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kualitas dari laporan keuangan yang disajikan."

**Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit**



Permasalahan lainnya adalah penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di 5 satuan pendidikan yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian realisasi belanja modal gedung dan bangunan jalan, irigasi, dan jaringan tidak seluruhnya sesuai spesifikasi kontrak, serta pengelolaan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai.

Opini WTP diberikan BPK atas LK Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan. Selain itu, juga berdasarkan pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.

"Prestasi ini hendaknya memotivasi para pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta kualitas dari laporan keuangan yang disajikan," kata dia.

Penerapan Audit Adaptif dengan Kecerdasan Buatan: Solusi Memenuhi Ekspektasi dan Harapan Masyarakat



Rakhmat Alfian
BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'. Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

Beberapa tahun lalu pengaduan atau harapan masyarakat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disampaikan melalui surat, email atau *whistle blowing system* (WBS). Namun saat ini paradigma tersebut telah berubah. Masyarakat sekarang lebih sering menyampaikan permasalahan langsung melalui media sosial dan media elektronik. Mulai dari ketidakpuasan mereka terhadap oknum aparat pemerintah yang bermasalah, infrastruktur yang rusak, pelayanan yang lambat, administrasi yang rumit, pungutan liar atau berupa kritik dan masukan.

Perubahan paradigma tersebut memberikan sebuah tantangan bagi BPK. Bagaimana BPK dapat merespons isu-isu yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat, dan memanfaatkannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Tantangan ini sejalan juga tertera pada Prinsip 12 (P-12) INTOSAI yang menekankan perlunya lembaga audit memahami harapan pemangku kepentingan dan meresponsnya dengan tepat waktu tanpa mengorbankan independensi mereka, serta menciptakan mekanisme untuk mengumpulkan informasi, mengambil keputusan, dan mengukur kinerja untuk meningkatkan relevansi lembaga audit bagi pemangku kepentingan.

Dalam era teknologi saat ini, mengumpulkan dan menganalisis informasi memerlukan pendekatan baru. Dahulu, informasi yang dihasilkan lebih terbatas, media massa diterbitkan secara berkala, mulai dari harian, mingguan atau bulanan. Sehingga dari segi jumlah masih dapat dilakukan secara manual oleh manusia. Namun, saat ini informasi di media massa diterbitkan secara *real-time* di berbagai situs web, belum lagi jika kita menambahkan informasi yang beredar di media sosial seperti Twitter/X, Instagram dan Facebook. Diperlukan sistem yang tidak hanya mampu mengumpulkan data-data tersebut, tetapi juga menganalisis serta memberikan masukan kepada auditor tentang prosedur pemeriksaan yang tepat.

Untuk menghadapi tantangan ini, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) dapat dijadikan sebuah solusi. AI memiliki kemampuan untuk mengelola dan menganalisis volume data yang besar dengan cepat dan efisien. Dengan teknik *Natural Language Processing* (NLP) dan *machine learning*, AI dapat mengenali pola dalam informasi, mendeteksi sentimen pada suatu teks, dan mengidentifikasi isu-isu yang mungkin relevan untuk pemeriksaan. Dengan demikian, AI dapat berperan dalam menyaring dan mengorganisir informasi yang akan menjadi dasar bagi prosedur audit yang adaptif atau menyesuaikan dengan harapan masyarakat.

"AI memiliki kemampuan untuk mengelola dan menganalisis volume data yang besar dengan cepat dan efisien. Dengan teknik *Natural Language Processing (NLP)* dan *machine learning*, AI dapat mengenali pola dalam informasi, mendeteksi sentimen pada suatu teks, dan mengidentifikasi isu-isu yang mungkin relevan untuk pemeriksaan."

Pemanfaatan AI dalam pemeriksaan dan pengelolaan organisasi ini juga menjadi salah satu fokus yang tertera pada Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2020-2024, pada Lampiran Bab III Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi, menyatakan salah satu faktor keberhasilan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah terkait implementasi *Big Data* dan AI.

Lalu bagaimana cara menyusun prosedur audit yang adaptif dengan AI? Artikel ini akan membuat usulan langkah yang dapat diterapkan pada Badan Pemeriksa Keuangan, yang nantinya juga akan menunjukkan hasil pelaksanaannya. Konsep "Audit Adaptif" dalam artikel ini adalah pendekatan yang memungkinkan auditor untuk menyesuaikan prosedur audit mereka dengan perubahan dalam sorotan masyarakat dan dinamika sosial. Konsep ini harapannya dapat menjadi langkah awal dalam menjaga relevansi dan efektivitas audit yang dilakukan oleh BPK.

Metodologi dan Hasil Implementasi

Pengumpulan data dari media elektronik dan media sosial adalah langkah awal dalam penerapan audit adaptif dengan bantuan AI. Pembuatan model analisis AI sangat bergantung dengan data, semakin banyak data maka model analisis yang dihasilkan semakin akurat dan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam.

Proses pengumpulan data ini melibatkan penggunaan teknologi *web scraping* atau dengan teknologi *crawling*. *Web scraping* adalah teknik otomatis untuk mengambil informasi dari situs web, sedangkan *crawling* adalah proses di mana program komputer menjelajahi internet untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber *online*. Kedua teknik ini memungkinkan pengumpulan data yang efisien, tetapi memerlukan komputer dengan kapasitas penyimpanan yang besar dan juga koneksi internet cepat untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data tidak terputus atau terhambat.

Pengumpulan data dilakukan dengan menarik data dari media elektronik Antara News yang diakses melalui <https://lampung.antaranews.com/lampung-update/bandarlampung> pada tanggal 6 November 2023. Data ini akan dijadikan sebagai bahan prototype untuk implementasi Audit Adaptif. Hasilnya didapatkan sebanyak 1.430 sampel artikel yang berkaitan dengan Kota Bandar Lampung, dengan contoh data sebagai berikut:

```
# Display the first few rows of the dataframe to understand its structure
data.head()

RESULT

                                simple-post \
0  Kemenag Lampung: Penganiayaan anak bukan terja...
1  Antisipasi peralihan musim, BPBD Lampung petak...
2  Rektor Itera dorong alumni dapat isi peluang k...
3  KPU Lampung umumkan 952 DCT calon legilatif Pe...
4  Ketua DPRD Lampung ucapkan terima kasih dan ap...

                                simple-share 3
0  05 November 2023 9:43 Wib
1  04 November 2023 21:23 Wib
2  04 November 2023 18:47 Wib
```

Gambar 1. Tinjauan data hasil scraping dari Antara News

Data-data tersebut selanjutnya masuk ke tahap *pre-processing*. Pada tahapan ini dilakukan beberapa proses antara lain memperbaiki kesalahan penulisan dan karakter, penghapusan duplikasi data.

Setelah data selesai diperbaiki, maka masuk ke tahapan selanjutnya yaitu analisis. Proses ini dilakukan untuk membuat model analisis dengan menggunakan aplikasi Python. Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dalam pengembangan AI, karena memiliki banyak *library* dan *framework* yang mendukung pengembangan AI. Dalam pengembangan Audit Adaptif diantaranya menggunakan *library* (1) TextBlob dan VADER *Sentiment Analysis* yang digunakan untuk memberikan sentimen positif, negatif, dan netral, (2) spaCy (NER) untuk mengidentifikasi entitas dinamai seperti unit kerja dan lokasi dalam sebuah teks;

Pada tahapan ini akan dihasilkan data analisis berupa data yang berisi nama artikel, tanggal artikel, link artikel, sentimen (untuk menandai sentimen/pandangan/pendapat dari artikel apakah positif, negatif atau netral), kategori, unit kerja dan lokasi untuk menunjukkan topik artikel, dimana artikel tersebut terjadi dan unit kerja apa yang terpengaruh akan kejadian tersebut.

Hasil analisis awal dapat dilihat pada contoh berita berikut, yang menunjukkan sentimen positif “Pekot Bandar Lampung klaim kebakaran TPA Bakung berhasil dikendalikan”, sentimen, sentimen negatif seperti “Pekot Bandar Lampung diminta perhatikan masalah sampah” dan sisanya tidak memiliki sentimen atau netral. Kolom lainnya seperti kategori, apakah termasuk keuangan negara, unit kerja yang terlibat dan lokasi juga telah diisi otomatis oleh model analisis yang dijalankan.

No	Judul	Link Berita	Sentimen	Kategori	Keuangan Negara (Y/N)	Unit Kerja	Lokasi	Tanggal
1	Kemenag Lampung: Penganjayaan anak bukan terjadi di pesantren	https://lampung.antaranews.com/berita/704448/kemenag-lampung-penganjayaan-anak-bukan-terjadi-di-pesantren	Netral		N	Kemenag	Lampung	2023-11-05 09:43:00
2	Antisipasi peralihan musim, BPBD Lampung petakan daerah rawan banjir	https://lampung.antaranews.com/berita/704397/antisipasi-peralihan-musim-bpbd-lampung-petakan-daerah-rawan-banjir	Netral		N	Bpbd	Lampung	2023-11-04 21:23:00
3	Itektor itera dorong alumni dapat isi peluang kepemimpinan masa depan	https://lampung.antaranews.com/berita/704391/itektor-itera-dorong-alumni-dapat-isi-peluang-kepemimpinan-masa-depan	Netral		N	itera	Lampung	2023-11-04 18:47:00
4	KPU Lampung umumkan 952 DCT calon legislatif Pemilu 2024	https://lampung.antaranews.com/berita/704355/kpu-lampung-umumkan-952-dct-calon-legislatif-pemilu-2024	Netral	Politik	N	Kpu	Lampung	2023-11-04 11:13:00
5	Ketua DPRD Lampung ucapkan terima kasih dan apresiasi dedikasi Wakil Gubernur Lampung	https://lampung.antaranews.com/berita/704274/ketua-dprd-lampung-ucapkan-terima-kasih-dan-apresiasi-dedikasi-wakil-gubernur-lampung	Netral	Politik	N	Dprd	Lampung	2023-11-03 16:13:00
6	KPU Lampung: SK pemberhentian ditunggu satu bulan usai penetapan DCT	https://lampung.antaranews.com/berita/704268/kpu-lampung-sk-pemberhentian-ditunggu-satu-bulan-usai-penetapan-dct	Netral		N	Kpu	Lampung	2023-11-03 19:22:00

Gambar 2. Hasil analisis awal berita

Proses analisis dilanjutkan dengan mengelompokkan informasi mana yang terkait pengelolaan keuangan negara dan yang bukan. Setelah pengelompokkan ini, sistem akan memberikan masukan tentang prosedur yang dapat diikuti oleh auditor. Untuk membuat prosedur pemeriksaan ini, digunakan *tools* Natural Language Processing (NLP) dan pemodelan bahasa berbasis AI, yaitu *Generative Pre-trained Transformer (GPT)*. Kedua *tools* ini diintegrasikan dengan bahasa pemrograman Python melalui penggunaan *Application Programming Interface (API)*, sehingga analisis sebelumnya yang telah dihasilkan, dapat langsung dianalisis lebih lanjut.

Model pengelompokan dalam artikel ini didasarkan pada kriteria yang melibatkan topik-topik terkait pengelolaan pemerintahan di Bandar Lampung. Hasilnya mengidentifikasi lima topik yang menjadi fokus utama, yaitu Pajak dan Pendapatan Daerah, Manajemen Bencana dan Kebakaran, Perlindungan Sosial, Ketahanan Pangan dan Keuangan, serta Pengelolaan Utang. Serta prosedur pemeriksaan yang telah disesuaikan dengan permasalahan yang ada di artikel-artikel yang dipilih. Adapun hasil analisis dan prosedur yang diusulkan oleh model adalah sebagai berikut:

"Dengan berpegang pada INTOSAI P-12 dan Renstra BPK 2020-2024, BPK dapat menjadi pionir dalam menghadapi tantangan baru ini dengan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memastikan bahwa keuangan publik dikelola dengan efisien dan akuntabel, sesuai dengan harapan masyarakat dan perkembangan teknologi saat ini."

No.	Nama Topik	Prosedur Pemeriksaan	Judul Artikel	Link Artikel
1	Pajak dan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifikasi pencapaian target pajak dengan data anggaran dan realisasi yang dipublikasikan. 2. Tinjau prosedur pengumpulan pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 3. Analisis metode peningkatan pendapatan daerah, seperti inisiatif pemungutan pajak baru atau peningkatan basis data wajib pajak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemkot Bandarlampung optimis pajak hiburan capai target Rp24 miliar 2. Pemkot Bandarlampung catat pajak hotel baru terealisasi 78 persen 	Link 1 Link 2
2	Manajemen Bencana dan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi rencana penanggulangan bencana dan respons kebakaran yang ada. 2. Periksa ketersediaan dan kondisi peralatan penanganan kebakaran. 3. Kaji ulang pelatihan dan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi situasi darurat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemkot Bandarlampung klaim kebakaran TPA Bakung berhasil dikendalikan 2. Pemkot Bandarlampung optimistis kebakaran di TPA sampah Bakung bisa diatasi 	Link 1 Link 2
3	Perlindungan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjau implementasi program BPJamsostek untuk masyarakat rentan. 2. Analisis distribusi bantuan sosial untuk memastikan pendistribusian yang adil dan tepat sasaran. 3. Periksa kerjasama antara Pemkot dan lembaga lain dalam penyediaan layanan sosial kepada warga. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemkot Bandarlampung upayakan masyarakat rentan terlindungi BPJamsostek 2. Pemkot Bandarlampung salurkan 584 ton beras bantuan dari Bapanas 	Link 1 Link 2
4	Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cek kebijakan Pemkot dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. 2. Uji efektivitas program yang digagas Pemkot untuk memastikan keamanan pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPRD minta Pemkot Bandarlampung jaga ketahanan pangan 2. Pemkot beri bantuan pangan guna hadapi siklus El Nino 	Link 1 Link 2
5	Keuangan dan Pengelolaan utang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit pengelolaan dana pinjaman dan rencana pembayaran utang. 2. Periksa penggunaan aset sebagai sumber pendapatan untuk pembayaran utang. 3. Evaluasi transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemkot, terutama terkait dengan pinjaman dan pembayaran utang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemkot Bandarlampung: Hutang ke SMI dibayar secara bertahap 2. Pemkot Bandarlampung sampaikan pembayaran hutang ke SMI dilakukan setiap tahun 	Link 1 Link 2

Gambar 3. Lima topik utama berita beserta dengan usulan prosedur pemeriksaan

Prosedur yang dihasilkan oleh model ini bersifat umum dan belum mencakup prosedur pemeriksaan hingga level transaksi, namun dapat digunakan sebagai panduan awal bagi auditor BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan. Proses ini diharapkan dapat melengkapi prosedur pemeriksaan standar yang sudah ada dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi *Standardized and Integrated Audit Process* (SIAP) yang telah dikembangkan BPK. Model Audit Adaptif ini tetap bergantung pada penilaian auditor untuk mempertimbangkan relevansi informasi, kecukupan sumber daya dan kemampuan auditor pada saat pemeriksaan.

Kesimpulan

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan meningkatnya responsivitas masyarakat terhadap isu-isu keuangan pemerintah, audit adaptif dengan dukungan teknologi AI telah muncul sebagai solusi inovatif yang dapat memperkuat peran BPK. Pendekatan ini tidak hanya mencakup pengumpulan dan analisis data yang efisien, tetapi juga menuntut kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu kunci yang relevan dan memberikan masukan bagi auditor. Dengan demikian, Audit Adaptif dapat dijadikan tonggak untuk menjaga relevansi dan efektivitas audit BPK di era informasi yang terus berubah. Hasil dari analisis yang dijalankan menghasilkan lima topik kunci yang disertai dengan usulan prosedur pemeriksaan.

Dengan berpegang pada INTOSAI P-12 dan Renstra BPK 2020-2024, BPK dapat menjadi pionir dalam menghadapi tantangan baru ini dengan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memastikan bahwa keuangan publik dikelola dengan efisien dan akuntabel, sesuai dengan harapan masyarakat dan perkembangan teknologi saat ini.



PENGAMANAN Email



Teliti sebelum membuka email

- Baca *subject*.
- Periksa alamat pengirim.
- Pastikan tidak ada hal yang mencurigakan.



Membuka email di perangkat yang dipastikan keamanannya.



Tidak membuka *attachment* atau klik link yang belum dapat dipastikan keamanannya/dikirim oleh orang tidak dikenal.

Berhati-hati jika harus membuka email di komputer publik (misalnya warnet atau komputer di bandara).



Pastikan *logout* dari aplikasi email jika menggunakan perangkat publik/orang lain.



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@umasbpkri.official](https://www.facebook.com/umasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



wartapemeriksa.bpk.go.id



12



13



14



15



16



17



18

12-17 Konsinyering AKN III dihadiri Ketua BPK Isma Yatun, 24 April 2024.

18-19 Ketua BPK Isma Yatun menyerahkan LHP LKPD Provinsi Sulawesi Utara kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut Fransiscus Andi Silangen dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, di Gedung DPRD Provinsi Sulut, Manado,, 30 April 2024.



19



31



32



33



34



35



36



37



38

31-33 Penyerahan LHP LKPD Provinsi DI Yogyakarta oleh Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit kepada Ketua DPRD DIY Nuryadi dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, 4 April 2024.

34-38 Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Slamet Edy Purnomo menyerahkan LHP Keparuhan PT Pelni, 23 April 2024.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



wartapemeriksa.bpk.go.id



KUIS

Rapat Koordinasi (rakor) pelaksana BPK tahun 2023 menjadi salah satu isu utama *Warta Pemeriksa* edisi Maret 2024.

Apakah tema rakor BPK tersebut?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



Pengamanan *Password*

* Gunakan *password* yang kuat
Panjang *password* minimal 8 karakter.

* Menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.



* Tidak menggunakan kata yang mudah ditebak atau terdapat dalam kamus.

* Tidak menggunakan angka atau kata yang bermakna identitas diri
Contoh : tanggal lahir, NIP, nama anak, nama binatang peliharaan, dan sebagainya.

Jaga Keamanan Password

* Tidak berbagi *password* dengan orang lain.

* Tidak menggunakan *password* yang sama untuk sistem/aplikasi yang berbeda.
Contoh: menggunakan *password* yang berbeda untuk medsos dan akun BPK.

* Tidak menuliskan *password* di kertas/ media lain yang terlihat dengan mudah.

* Logout dari aplikasi yang sudah tidak digunakan.



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



wartapemeriksa.bpk.go.id



Selamat Idulfitri

1 Syawal 1445 Hijriyah



www.bpk.go.id



[@bpkriofficial](https://www.instagram.com/bpkriofficial)



[@bpkri](https://twitter.com/bpkri)



08111907010



BPK RI Official



[@humasbpkri.official](https://www.facebook.com/humasbpkri.official)



[@bpk.ri](https://www.tiktok.com/@bpk.ri)



wartapemeriksa.bpk.go.id